

Judul : Peringkat utang Indonesia jadi negatif, komisi XI harap defisit anggaran tetap terjaga
Tanggal : Jumat, 06 Maret 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Peringkat Utang Indonesia Jadi Negatif

Komisi XI Harap Defisit Anggaran Tetap Terjaga

Tiga Lembaga pemeringkat utang Global Moody's, Standard & Poor's (S&P), dan Fitch Ratings memberikan outlook atau proyeksi rating utang Indonesia dari stabil menjadi negatif. Hal ini harus menjadi peringatan serius bagi Pemerintah untuk waspada dan hati-hati dalam mengelola fiskal.

ANGGOTA Komisi XI DPR Muhammad Kholid mengingatkan Pemerintah perlu bersikap lebih rendah hati, hati-hati, dan waspada dalam mengelola kebijakan fiskal di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Peringatan lembaga asing itu tidak boleh dianggap sepele.

"Tugas utama Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa adalah memastikan disiplin fiskal tetap terjaga, terutama agar defisit anggaran tidak melampaui batas yang telah ditetapkan oleh undang-undang," ujar Kholid dalam keterangannya, Kamis (5/3/2026).

Diketahui, keputusan Moody's, Standard & Poor's (S&P), dan Fitch Ratings yang memberikan outlook negatif terhadap utang

Indonesia merupakan sinyal peringatan penting terhadap kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta arah kebijakan fiskal Pemerintah ke depan.

Kholid melanjutkan, Pemerintah harus memastikan defisit APBN tidak melampaui batas maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara. "Batas ini adalah pagar penting untuk menjaga stabilitas fiskal dan kepercayaan pasar," tegas politikus PKS ini.

Kholid mengingatkan, tantangan fiskal ke depan akan semakin berat seiring meningkatnya ketidakpastian geopolitik global. Konflik yang memanas antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat berpotensi memicu gejo-



Muhammad Kholid

lak besar di pasar energi dunia.

"Perang Iran versus Israel-AS berpotensi mendorong kenaikan harga minyak internasional, yang pada akhirnya dapat memberikan tekanan tambahan terhadap APBN kita," ucapnya.

Pemerintah, lanjutnya, harus waspada dua risiko utama yang dapat berdampak langsung pada kondisi fiskal nasional. Yaitu, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan kenaikan harga minyak dunia yang terjadi bersamaan.

Dia bilang, pelemahan rupiah

akan meningkatkan beban pembayaran utang dan biaya impor energi. Di sisi lain, kenaikan harga minyak dapat memperbesar beban subsidi dan kompensasi energi dalam APBN. Karena itu, semuanya harus dihitung secara sangat cermat.

Selain itu, gejolak energi global dapat menimbulkan tekanan inflasi, terutama pada sektor energi dan pangan yang sangat sensitif terhadap perubahan harga komoditas dunia. Karena itu, ancaman kenaikan inflasi energi dan pangan juga harus diantisipasi dengan serius. "Gejolak harga minyak biasanya akan merambat pada biaya transportasi, distribusi, hingga harga bahan pokok," jelasnya.

Ia menambahkan, dalam situasi global yang semakin tidak menentu, kebijakan fiskal harus bersifat adaptif, responsif, dan berbasis kehati-hatian. Oleh sebab itu, kebijakan fiskal perlu terus beradaptasi dengan dinamika global.

"Jika diperlukan, Pemerintah harus berani melakukan perbalikan atau koreksi kebijakan untuk mengantisipasi gejolak eksternal tersebut. Pemerintah harus me-

astikan kebijakan fiskal tetap prudent atau bijaksana, disiplin, dan kredibel, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik global saat ini," tandasnya.

Bagaimana tanggapan Pemerintah? Kepala Buro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemkeu) Deni Sujantoro memastikan, Indonesia tetap berada di jalur positif untuk memperkuat pertumbuhan dan ketahanan ekonomi jangka menengah.

"Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen menjaga stabilitas makroekonomi dan melanjutkan disiplin fiskal, sebagaimana dimandatkan dalam undang-undang," tegas Deni dalam keterangannya, Kamis (5/3/2026).

Komitmen lain yang akan dilakukan Pemerintah adalah memperbaiki iklim usaha. Caranya, dengan langkah *debottlenecking* atau menghilangkan hambatan dan deregulasi untuk peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Tentunya, sambil memperkuat reformasi struktural untuk meningkatkan ketahanan ekonomi. ■ TIF